

PEMBENTUKAN ETIKA KEMANUSIAAN DALAM PENDIDIKAN UNTUK MENGHAPUS DISKRIMINASI MAYORITAS DAN MINORITAS DI SEKOLAH

Edy Sutanto¹, Ahmad Riki Safudin², Wahib Maulana Albukhori³, Ella Nadiya Pritadana⁴,
Day Ramadhani Amir⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Teknologi Informasi, IKIP PGRI Bojonegoro, Jalan Panglima Polim No. 46,
Bojonegoro.

E-mail: sutantoedy121@gmail.com, rikisafudinrikisafudin@gmail.com, wahiblexs@gmail.com,
ella04761@gmail.com, day.ramadhani@ikippgribojonegoro.ac.id

Abstrak

Pendidikan sangat penting untuk pengembangan kepribadian dan prinsip-prinsip moral. Pendidikan seharusnya menjadi lingkungan moral tempat siswa belajar hidup berdampingan dalam keberagaman, bukan sekadar cara untuk berbagi informasi. Meskipun demikian, sekolah-sekolah di Indonesia terus menunjukkan perilaku diskriminatif yang mengakar kuat, baik secara simbolis maupun struktural, antara kelompok mayoritas dan minoritas. Marjinalisasi identitas, stereotip budaya, dan akses serta partisipasi yang tidak setara dalam kegiatan sekolah semuanya dapat menjadi bentuk diskriminasi ini. Ketimpangan ini merusak semangat keadilan sosial dan inklusivitas sekaligus mencegah orang berkembang. Melalui pemeriksaan beberapa jurnal ilmiah terkait, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menyelidiki bagaimana pendidikan dapat berkontribusi dalam menumbuhkan etika manusia sebagai sarana untuk memberantas diskriminasi di kelas. Penekanan utama penelitian ini adalah pada cita-cita Pancasila, khususnya sila kedua, dan bagaimana cita-cita ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, metode pengajaran, dan posisi guru. Menurut temuan penelitian, ada tiga cara utama untuk mempromosikan etika kemanusiaan dalam pendidikan: mengintegrasikan prinsip-prinsip kemanusiaan ke dalam kurikulum, secara konsisten menegakkan undang-undang antidiskriminasi, dan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru dalam menumbuhkan kesadaran etika dan sosial. Dalam lingkungan ini, pendidikan harus mendukung prinsip-prinsip keadilan dan tidak tetap acuh tak acuh terhadap ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat inklusif yang menghargai kemanusiaan dan peradaban, bukan hanya cara untuk memperoleh pengetahuan.

Kata kunci: Etika Kemanusiaan, Pendidikan Inklusif, Diskriminasi, Mayoritas dan Minoritas, Nilai-nilai kemanusiaan

Abstract

Education is essential for personal development and the formation of moral principles. Education should serve as a moral environment where students learn to live together in diversity, not merely as a means of sharing information. Nevertheless, schools in Indonesia continue to display deeply rooted discriminatory practices, both symbolically and structurally, between majority and minority groups. This discrimination may take the form of identity marginalization, cultural stereotyping, and unequal access to and participation in school activities. Such disparities undermine the spirit of social justice and inclusivity while also hindering individual growth. Through an examination of several relevant academic journals, this study employs a qualitative methodology to explore how education can contribute to fostering humanistic ethics as a means of eradicating classroom discrimination. The study places particular emphasis on the ideals of Pancasila, especially its second principle, and how these ideals can be integrated into curricula, teaching methods, and the role of educators. The findings indicate three primary strategies to promote humanistic ethics in education: integrating human values into the curriculum, consistently enforcing anti-discrimination policies, and providing ongoing teacher training to cultivate ethical and social awareness. In such a setting, education must uphold the principles of justice and cannot remain indifferent to inequality. Therefore, education serves as a foundation for building an inclusive society that values humanity and civilization, not merely as a channel for acquiring knowledge.

Keyword: Human Ethics, Inclusive Education, Discrimination, Majority and Minority, Humanitarian Values

PENDAHULUAN

Dalam rangka membangun karakter dan budaya bangsa yang bermartabat, pendidikan memegang peranan penting. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pengembangan nilai, norma, dan etika sosial yang memengaruhi jalannya kehidupan bersama. Pendidikan memiliki kewajiban moral untuk menanamkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial di negara yang majemuk seperti Indonesia. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terus dilakukan secara sistematis dalam dunia pendidikan, baik secara simbolis maupun struktural.

Selain interaksi antarpribadi antara murid atau instruktur, diskriminasi di sekolah juga terjadi melalui kebijakan institusi, kurikulum yang bias, dan norma budaya yang memihak kelompok mayoritas. Menurut Firdaus dkk. (2024), kelompok mayoritas dan minoritas di sekolah sering kali terwakili secara tidak setara dalam dinamika hubungan mereka, dan norma budaya tertentu dianggap "standar" dan mendominasi. Akibatnya, kelompok minoritas terpinggirkan dalam sejumlah bidang, termasuk peluang untuk berekspresi dan mengambil keputusan.

Dalam lingkungan ini, sekolah bukan hanya sekadar pusat pendidikan; sekolah juga merupakan arena untuk mereplikasi ideologi sosial yang berlaku. Nilai-nilai mayoritas, yang sering dianggap universal, tercermin dalam praktik keagamaan, bahasa pengantar, simbol budaya, dan cara mengungkapkan rasa terima kasih. Sebaliknya, nilai-nilai, budaya, dan identitas kelompok minoritas diabaikan atau dianggap menyimpang. Menurut Ndona dan Lathifah (2024), sistem pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai keadilan dan inklusi dapat memperburuk ketimpangan sosial. Jika pendidikan gagal menghargai keberagaman, maka pendidikan akan menumbuhkan lingkungan belajar yang eksklusif dan tidak toleran terhadap keberagaman.

Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan kembali fungsi pendidikan sebagai sarana pemberdayaan dan perubahan masyarakat. Salah satu metode penting dalam konteks ini adalah dengan mempromosikan etika kemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila kedua yang menyoroti pentingnya menghormati martabat manusia. Etika kemanusiaan tidak hanya melibatkan bagaimana siswa memahami gagasan tentang benar dan salah, tetapi juga bagaimana mereka memasukkan prinsip-prinsip empati, toleransi, dan keadilan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kerangka etika kemanusiaan dalam pendidikan harus dipahami secara praktis, bukan hanya secara teoritis. Menurut Lestari dkk. (2024), pendidikan yang efektif harus mampu menumbuhkan kesadaran etika pada siswa dengan menggunakan contoh-contoh nyata, interaksi yang adil, dan lingkungan belajar yang inklusif. Dalam skenario ini, guru berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Sebagai figur otoritas di kelas, instruktur bertanggung jawab untuk menyampaikan konten pelajaran dan berperan sebagai panutan moral yang mencontohkan cita-cita kemanusiaan melalui tindakan mereka.

Ketidakadilan tidak dapat diperlakukan secara tidak memihak dalam pendidikan etika. Bahkan, dalam konteks ketidaksetaraan, netralitas memperkuat status quo yang diskriminatif. Akibatnya, instruktur harus memiliki pemahaman yang kuat tentang struktur sosial dan hubungan kekuasaan yang mendasari epidemi diskriminasi di sekolah. Salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas guru untuk refleksi dan etika ketika berinteraksi dengan keberagaman di kelas adalah program pelatihan guru berbasis studi kasus diskriminatif yang disarankan oleh Sari et al. (2025). Selain meningkatkan kesadaran guru, kurikulum sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang etis dan inklusif. Kurikulum yang menggabungkan cita-cita keadilan sosial dan kemanusiaan dapat menjadi kekuatan yang ampuh untuk perubahan, menurut Permata Sari et al. (2025). Dengan memasukkan mata pelajaran seperti hak asasi manusia, keadilan antarbudaya, dan penghormatan terhadap keberagaman ke dalam pelajaran di kelas, siswa dapat didorong untuk melihat bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kenyataan yang harus diakui dan dihargai.

Selain itu, pendekatan pembelajaran eksperiensial dapat menjadi strategi yang berhasil untuk menumbuhkan kesadaran sosial siswa. Diskusi kelas tentang topik-topik seperti keberagaman dan diskriminasi, serta inisiatif sosial yang mencakup interaksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dapat menawarkan tempat untuk introspeksi yang meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lumban Batu dkk. (2024), yang berpendapat bahwa sila kedua Pancasila harus dipraktikkan dalam pendidikan melalui metode pembelajaran yang menggabungkan pengalaman kognitif dan emosional pada saat yang bersamaan.

Selain itu, lingkungan belajar harus dibuat menjadi tempat yang aman bagi semua murid. Menurut Mardiyanto (2024), pendidikan inklusif bukan hanya tentang menyatukan siswa dalam satu kelas; tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai, aman, dan diterima, apa pun identitasnya. Dedikasi terhadap prinsip-prinsip antikekerasan, antidiskriminasi, dan keadilan representatif harus tercermin dalam peraturan sekolah. Ini mencakup pedoman yang melindungi hak-hak siswa minoritas, penyediaan fasilitas ibadah lintas agama, dan penghormatan terhadap hari besar keagamaan berbagai agama, dan masih banyak lagi.

Dengan mempertimbangkan gagasan-gagasan ini, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana membangun etika kemanusiaan dalam pendidikan dapat menjadi pendekatan yang mengubah permainan untuk mengakhiri diskriminasi antara kelompok mayoritas dan minoritas di sekolah. Makalah ini akan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka untuk mengkaji dinamika kekuasaan dalam interaksi mayoritas-minoritas dan mengembangkan langkah-langkah praktis yang dapat digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk memajukan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

METODE

Metodologi kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan diskriminasi di sekolah dan pengembangan etika kemanusiaan dalam pendidikan. Metode ini dipilih karena dianggap mampu mengungkap makna tersirat dari peristiwa sosial dan budaya yang terjadi di lingkungan pendidikan, dengan fokus khusus pada dinamika antara kelompok mayoritas dan minoritas di lingkungan sekolah. Informasi dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jurnal ilmiah nasional yang secara luas mengulas topik tentang diskriminasi, pendidikan inklusif, nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, dan peran pendidikan dalam pembinaan karakter dan etika kemanusiaan. Topik penelitian ini terkait langsung dengan seluruh jurnal akademik yang diteliti, dan semuanya terbit selama beberapa tahun terakhir.

Analisisnya bersifat deskriptif; setiap esai dibaca dengan saksama untuk mengekstrak perspektif, ide, dan kesimpulan penulis tentang fenomena diskriminasi dan strategi transformatif di bidang pendidikan. Konten setiap majalah diteliti untuk menentukan bagaimana konten tersebut dapat berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana pendidikan dapat menumbuhkan nilai-nilai etika kemanusiaan yang relevan di sekolah dalam konteks pluralisme budaya dan kepercayaan.

Analisis difokuskan pada hubungan antara ide-ide penulis jurnal dan realitas sosial di sekolah, dengan fokus pada bagaimana dominasi identitas kelompok mayoritas dapat berkontribusi pada marginalisasi kelompok minoritas. Lebih jauh, kurikulum, fungsi guru, dan metode pengajaran semuanya dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap keberagaman.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual yang kuat dan penting tentang fungsi pendidikan dalam memberantas diskriminasi dan menumbuhkan lingkungan

belajar yang mendukung prinsip-prinsip kemanusiaan, sebagaimana dinyatakan dalam sila kedua Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisisnya bersifat deskriptif, dengan setiap artikel dibaca dengan saksama untuk mengidentifikasi ide, konsep, dan kesimpulan yang dibuat oleh penulis mengenai fenomena diskriminasi dan pendekatan revolusioner di bidang pendidikan. Setiap artikel jurnal dievaluasi potensinya untuk memajukan pengetahuan kita tentang bagaimana pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai etika kemanusiaan yang relevan dalam konteks pluralisme budaya dan agama di sekolah.

Penelitian ini difokuskan pada hubungan antara ide-ide penulis jurnal dan realitas sosial di sekolah, dengan penekanan khusus pada bagaimana supremasi identitas kelompok mayoritas dapat berkontribusi pada marginalisasi kelompok minoritas. Lebih jauh, desain kurikulum, fungsi guru, dan strategi pengajaran semuanya dapat berkontribusi pada internalisasi nilai-nilai seperti keadilan, empati, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual yang menarik dan penting bagi fungsi pendidikan dalam memberantas diskriminasi dan menumbuhkan lingkungan belajar yang mendukung prinsip-prinsip kemanusiaan, sebagaimana diuraikan dalam sila kedua Pancasila.

1. Mengurai Realitas Diskriminasi di Sekolah

Di sekolah, kelompok mayoritas dan minoritas masih diperlakukan tidak adil secara sistematis. Firdaus dkk. (2024) menunjukkan bagaimana ketimpangan akses dan dominasi identitas kelompok mayoritas berkontribusi terhadap eksklusi sosial kelompok minoritas. Prasangka dalam sistem pendidikan ini mengambil bentuk pelabelan yang merugikan siswa dari latar belakang tertentu, kurikulum yang bias, dan dinamika kekuasaan dalam interaksi sosial.

Kurangnya representasi kelompok minoritas dalam kepengurusan OSIS atau dalam acara seremonial sekolah adalah salah satu ilustrasi nyata. Dominasi kelompok mayoritas dalam hal simbol dan budaya sering dianggap "normal", sementara ekspresi identitas minoritas dianggap menyimpang. Hal ini membentuk sistem diskriminasi simbolik yang mengakar kuat dan membatasi kemampuan siswa minoritas untuk berbicara.

Pendidikan yang manusiawi harus memberi ruang bagi berbagai identitas, menurut Lathifah dan Ndona (2024). Mereka menyoroti bahwa sistem pendidikan yang tidak memberi ruang bagi cerita dan pengalaman kelompok minoritas telah gagal menegakkan nilai-nilai keadilan distributif dan representatif. Lebih jauh, ketiadaan undang-undang yang menjamin representasi yang adil dalam pendidikan, sebagaimana disoroti oleh Mardiyanto (2024), yang menunjukkan bahwa ketimpangan ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga dilembagakan, memperburuk diskriminasi sistemik dalam pendidikan. Karena struktur ini, sekolah menjadi tempat untuk mereplikasi ketimpangan sosial daripada lembaga yang membebaskan.

2. Pendidikan sebagai Agen Transformasi Etika

Pendidikan berfungsi sebagai wadah pengembangan prinsip moral dan etika. Etika dalam pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan benar dan salah, tetapi tentang mengembangkan karakter siswa secara utuh dengan menginternalisasi nilai-nilai, menurut Devi Ayu Lestari dkk. (2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sikap kemanusiaan didasarkan pada aspek sosial dan emosional pendidikan.

Interaksi antara pengajar dan siswa harus mencerminkan etika kemanusiaan yang tertuang dalam sila kedua Pancasila. Guru memiliki tugas untuk memberikan pengetahuan sekaligus menjadi panutan etika dengan menumbuhkan toleransi, empati, dan rasa hormat terhadap keberagaman. Dalam konteks ini, guru adalah agen perubahan yang dapat mendorong pemahaman kelompok tentang nilai hidup berdampingan dalam keberagaman.

Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika karena pengembangan karakter moral dan etika siswa sangat bergantung pada integritas sistem nilai yang diajarkan sejak usia muda, menurut Yusri dkk. (2021). Etika harus diterapkan dalam skenario kelas dunia nyata, seperti menangani perselisihan antara kelompok identitas, dan bukan hanya sebagai konsep buku teks.

Ketidakadilan tidak boleh diperlakukan secara netral oleh dunia pendidikan. Dalam lingkungan yang diskriminatif, netralitas berarti mendukung quo yang tidak adil. Oleh karena itu, guru harus menerima pelatihan berkelanjutan dalam kesadaran etika, seperti yang direkomendasikan dalam artikel "Pentingnya Etika dalam Pendidikan," yang menyatakan bahwa pendidikan etika yang efektif mendorong pengembangan hubungan yang adil dan terhormat.

3. Integrasi Nilai Etika Kemanusiaan dalam Kurikulum

Khususnya pada prinsip kedua, Sari dkk. (2025) menekankan pentingnya pembinaan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem pendidikan yang berkeadilan. Mereka mengatakan bahwa kurikulum yang tidak memuat prinsip-prinsip kemanusiaan hanya akan memperburuk ketimpangan dan pengucilan sosial.

Kurikulum yang baik harus memuat materi yang mempromosikan cita-cita keadilan, persamaan hak, dan belas kasih bagi kelompok lain, khususnya mereka yang terpinggirkan secara sosial dan budaya. Pembelajaran berbasis proyek dan metode lain yang membahas topik-topik diskriminasi atau ketidakadilan sosial dapat membantu siswa melihat keberagaman bukan hanya sebagai sebuah konsep tetapi juga sebagai kenyataan yang perlu ditangani secara etis.

Menurut Lumban Batu dkk. (2024), prinsip kedua Pancasila menyoroti pentingnya menghormati martabat manusia dan solidaritas antarmanusia. Oleh karena itu, memasukkan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum harus menjadi kerangka utama pembelajaran, bukan sekadar komponen tambahan. Integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kurikulum juga dapat dilakukan dengan menumbuhkan suasana belajar yang inklusif dan meningkatkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa, menurut sebuah artikel oleh Permata Sari et al. (2025). Dengan metode ini, siswa dibentuk menjadi manusia bermoral yang dapat membuat penilaian etis dengan merefleksikan realitas sosial secara kritis.

4. Pendidikan Inklusif dan Ruang Aman bagi Semua

Pendidikan inklusif, sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Mardiyanto (2024), bukan sekadar tentang menyatukan semua murid dalam satu lokasi fisik; melainkan tentang memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk diidentifikasi, dihormati, dan terlibat aktif dalam semua aspek kehidupan sekolah. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama, budaya, ras, atau status sosial ekonomi ditolak oleh pendidikan inklusif berdasarkan prinsip-prinsip etika kemanusiaan.

Agar sekolah menjadi tempat yang aman, sekolah harus bebas dari diskriminasi, baik yang diungkapkan secara verbal, simbolis, maupun struktural. Ibnu menekankan dalam jurnalnya bahwa pendidikan inklusif adalah upaya kelompok yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dengan menolak segala bentuk diskriminasi sistemik. Ini menyiratkan bahwa sekolah harus berupaya menghilangkan prasangka dari kebijakan dan praktik mereka.

Taktik konkretnya meliputi pembentukan tempat ibadah yang adil, pengakuan hari raya lintas agama, dan pembentukan undang-undang antidiskriminasi yang dimasukkan ke dalam peraturan sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh Permata Sari et al. (2025), lingkungan sekolah yang menumbuhkan rasa aman psikologis telah terbukti meningkatkan keterlibatan aktif siswa dari kelompok minoritas.

5. Dinamika Kekuasaan Mayoritas dan Kerentanan Minoritas

Hegemoni kelompok mayoritas dalam sistem pendidikan menghasilkan kesenjangan simbolik dan struktural. Sebagaimana dirinci dalam jurnal Firdaus et al. (2024), kelompok mayoritas sering kali memiliki kekuasaan atas kurikulum sekolah, pengajaran bahasa, dan representasi budaya. Kaum minoritas dijadikan "tamu" di ruang yang seharusnya terbuka untuk semua orang karena masalah ini.

Kelompok minoritas tunduk pada pembatasan kuantitatif dan penekanan identitas mereka. Pengalaman hidup dan nilai-nilai budaya kelompok minoritas diabaikan ketika simbol dan nilai mayoritas dianggap sebagai "standar universal." Sebagai akibat dari marginalisasi ini, keterlibatan sosial dan kesehatan mental siswa minoritas terganggu.

Firdaus dkk. menyoroti nilai pembelajaran dan komunikasi antarbudaya antara masyarakat untuk melawan otoritas ini. Diskusi semacam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan saling pengertian dan mengurangi stereotip, tidak hanya secara simbolis. Selain itu, pendidikan antarbudaya ini konsisten dengan cita-cita Pancasila, khususnya dalam menumbuhkan rasa kesatuan di tengah keragaman.

6. Pemberdayaan Guru dan Lingkungan Belajar

Guru menempati posisi strategis sebagai fasilitator nilai dan agen perubahan. Dalam publikasi mereka "Pentingnya Pendidikan," Sari dkk. berpendapat bahwa guru perlu diberdayakan tidak hanya secara pedagogis tetapi juga secara moral dan sosiologis. Mereka harus kompeten dalam menangani keberagaman kelas dan menyadari dinamika kekuasaan yang dapat berkembang di antara siswa dari berbagai latar belakang.

Menggunakan studi kasus diskriminasi sebagai dasar pelatihan guru dapat menjadi cara yang bermanfaat untuk memengaruhi pemikiran etis guru. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian jurnal tersebut, instruktur juga perlu dimotivasi untuk menjadi panutan dalam membina interaksi yang adil dan inklusif.

Menciptakan lingkungan belajar yang positif melibatkan lebih dari sekadar sumber daya fisik; hal itu juga melibatkan lingkungan psikososial yang ramah, saling menghormati, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Ini adalah dasar penting untuk internalisasi nilai-nilai kemanusiaan pada akhirnya. Sekolah dapat menjadi tempat untuk transformasi sosial daripada sekadar transmisi pengetahuan jika guru menyadari peran mereka sebagai aktor moral.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan etika humanistik sebagai reaksi terhadap praktik diskriminatif terhadap siswa minoritas dan mayoritas di sekolah. Diskriminasi terwujud secara simbolis dan struktural, seperti yang terlihat dalam prevalensi budaya mayoritas, kurikulum yang bias, dan kurangnya representasi kelompok minoritas, serta pada tingkat interpersonal. Ketimpangan ini menghasilkan lingkungan belajar yang tidak adil dan menghambat pertumbuhan psikososial dan akademis siswa minoritas.

Dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif berdasarkan pemeriksaan jurnal ilmiah, penelitian ini menentukan bahwa pendidikan dapat bertindak sebagai kekuatan transformatif

etika ketika sengaja dirancang untuk mempromosikan nilai-nilai humanistik. Nilai-nilai ini, yang termasuk dalam sila kedua Pancasila, dapat diinternalisasi melalui tiga pendekatan utama: pertama, secara sadar dan bijaksana memasukkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam kurikulum; kedua, secara konsisten menerapkan langkah-langkah antidiskriminasi di sekolah; dan ketiga, menawarkan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kepekaan etika, empati, dan kapasitas mereka untuk memperlakukan keberagaman secara adil.

Dalam menghadapi ketimpangan, pendidikan yang mendukung keadilan sosial tidak boleh netral. Sebaliknya, pendidikan harus berfungsi sebagai tempat untuk menentang sistem yang menormalisasi prasangka. Karenanya, pendidikan berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat madani yang inklusif dan bebas dari bias, selain berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan. Etika humanistik pendidikan merupakan kebutuhan nyata untuk membangun masa depan yang adil dan pluralistik bagi negara, bukan sekadar cita-cita moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, F., Anindhita, D., & Sari, R. N. (2024). *Islam dan Keragaman: Isu Mayoritas dan Minoritas Beragama*. Ekspos: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 3(1), 180–184.
- Lathifah, M., & Ndona, Y. (2024). *Peran Pendidikan dalam Membangun Kemanusiaan yang Beradab*. Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan, 2(3), 184–193.
- Lestari, D. A., Kholisah, W., & Supriyanto, M. R. J. (2024). *Pentingnya Etika dan Moral dalam Pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 4(3), 43–49.
- Lumban Batu, R., dkk. (2024). *Menyelami Esensi Sila Kedua Pancasila dalam Konteks Pendidikan*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 3(2), 1158–1165.
- Mardiyanto, I. (2024). *Membangun Masyarakat yang Berkeadilan Melalui Pendidikan Inklusif Tanpa Diskriminasi Sistemik*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Permata Sari, P., Pamungkas, D. E. R., Saputri, T. A., Budiani, G. K., & Dwiyantri, A. (2025). *Pentingnya Pendidikan untuk Mewujudkan Keadilan Berlandaskan Sila Kedua Pancasila dalam Menghapus Pengelompokan Minoritas dan Mayoritas di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Lentera Ilmu, 1(1), 67–75.
- Yusri, F. A., Yuriska, R., & Arditasari, S. T. (2021). *Pendidikan Karakter dan Etika dalam Pendidikan*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Universitas PGRI Palembang, 15–16 Januari 2021, 330–335.